



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Rapat Koordinasi Pilkades 2026 di Opsroom Setdakab Sidoarjo.

Pemkab Sidoarjo Gelar Pilkades Serentak 2026 di 80 Desa

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun depan. Pesta demokrasi lima tahunan itu akan digelar di 80 desa.

Penetapan tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing, Kepala Kejaksaaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo.

Dalam kesepakatan pilkades serentak itu, tahapan pelaksanaan dimulai dengan masa persiapan pada 1 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026. Tahapan pencalonan berlangsung pada 14 Januari hing-

ga 23 April 2026, disusul pelaksanaan pemungutan suara pada 24 Mei 2026. Tahap penetapan hasil pilkades dijadwalkan 24 Mei hingga 29 Juni 2026.

Bupati menegaskan, pemkab bersama forkopimda berkomitmen menjaga pelaksanaan pilkades agar berjalan aman dan lancar. "Kami ingin Pilkades 2026 ini menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan damai. Pemkab Sidoarjo bersama forkopimda siap memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel," katanya saat memberikan arahan pada Rapat Pilkades Serentak 2026 di Opsroom Setda Sidoarjo, Senin (3/11).

Bupati menambahkan, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah selama proses pemilihan. "Pilkades bukan sekadar ajang memilih pemimpin

desa, tetapi momentum memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Sidoarjo dari tingkat desa," lanjutnya.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing memastikan seluruh tahapan Pilkades 2026 akan berlangsung kondusif dengan menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat. "Kami siap melakukan pengamanan pada saat pilkades serentak tahun 2026 mendatang," ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang pilkades yang hanya diikuti satu calon. Keputusannya, pilkades di desa itu ditunda hingga terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (adv/kri/san/epe)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Dua Kompleks Makam di Waru Akan Dipindah

Terimbas Pembangunan Frontage Road

SIDOARJO - Frontage road (FR) di Waru ditargetkan rampung tahun depan. Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan skema pemindahan makam untuk mempercepat penyelesaian pembangunan FR. Dua makam yang berlokasi di Desa Kramat Kulon, dekat Polsek Waru dan di sekitar Stasiun Waru yang masih Desa Kedungrejo akan segera direlokasi.

Bupati Sidoarjo Subandi

mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan kesepakatan dengan pihak desa dan masyarakat terkait lahan makam.

Menurut dia, permasalahan lahan makam yang ada di Desa Waru sudah terselesaikan. Pemkab sudah mendapat lahan baru untuk penggantinya.

Sementara untuk makam umum Desa Kedungrejo akan dipindahkan ke wilayah Kedungrejo Barat. Luasnya 1.500 meter persegi.

Sebelumnya, sementara muncul persoalan sertifikat ganda atas lahan



KURANG BERFUNGSI: Frontage road di wilayah Waru yang masih belum tersambung ke Buduran. Tahun depan proyek itu akan dilanjutkan lagi.

pengganti tersebut. Namun, masih belum tuntas dan telah disepakati penyelesaiannya melalui jalur hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Kami menujukkan kepada Bagian Hukum Setda untuk mengawal proses hukum tersebut. Agar transaksi nanti tidak

KELANJUTAN PROYEK FRONTAGE ROAD DI SIDOARJO

Disiapkan anggaran Rp 40 miliar untuk pembebasan lahan

Pembangunan direncanakan tahun 2026

Ada pemindahan dua makam untuk pembangunan

Pemkab bakal berkoordinasi dengan kementerian untuk pembangunan

GRAPIS ADITYAWINA POS

terganggu masalah hukum," jelas Subandi.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Tidak saja pembebasan lahan. Pemkab juga akan fokus pada konstruksi. Targetnya tahun depan sudah dimulai pembangunan.

Pemkab menyiapkan anggaran Rp 40 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan.

Subandi mengatakan jika pemkab akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menentukan langkah penyelesaian lanjutan FR

sampai wilayah kota. Dia berharap seluruh persoalan lahan bisa tuntas pada maksimal awal 2026. Sehingga di tahun yang sama pembangunan fisik dapat dirampungkan. "Kami berharap frontage road bisa dilewati dari Waru hingga Sidoarjo pada 2026," ujarnya.

Keberadaan FR dianggap penting untuk mengurangi kemacetan. Terutama di jalur internasional penghubung Surabaya-Sidoarjo. Upaya untuk menuntaskannya dilakukan berdasarkan berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena anggaran yang diperlukan cukup besar. (ezz/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SATPOL PP



DOK SATPOL PP SIDOARJO

MENDENGAR ARAHAN: Empat orang anggota Satpol PP Sidoarjo berbaris rapi di belakang tameng saat apel kemarin.

Perkuat Intelijen Awasi Pelanggar Perda

SIDOARJO – Masih ada pelanggar peraturan daerah (perda) yang ditemukan di wilayah Sidoarjo. Melihat kondisi tersebut, Satpol PP Sidoarjo menggelar apel untuk mengoptimalkan fungsi intelijen untuk mendekripsi persoalan.

Kasi Ops Satpol PP Sidoarjo Novianto Koesno menyatakan, permasalahan ketertiban tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana. Di sejumlah kasus, ranahnya masuk ke pelanggaran perda. Misalnya, PKL liar atau peredaran minuman keras (mi-

ras) dan reklame ilegal. "Wewenang kami disana, katanya kemarin (4/11).

Novianto mengatakan, apel tersebut menjadi sara-na untuk berkoordinasi dengan seluruh anggota. Mereka diminta siap untuk terus menjaga ketertib-an. Termasuk mengawasi penjual miras dan PKL yang seringkali berjualan sembarangan. (edi/hen)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

TAHAPAN PILKADES 2026

- ✓ Tahapan dimulai Desember
- ✓ Ada 80 desa yang menggelar pilkades
- ✓ Pemungutan suara pada 24 Mei 2026
- ✓ Disiapkan anggaran Rp 20 miliar untuk pelaksanaannya

GRAFIS: ADIT/JAWA POS

JADI LOKASI SUKSES: Desa Bangah menjadi salah satu desa yang akan menggelar pemilihan tahun depan.

80 Desa Gelar Pilkades Serentak Mulai Desember

Pencalonan 14 Januari sampai 23 April 2026

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo telah menetapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2026. Pesta demokrasi di tingkat desa dimulai pada awal Desember. Nantinya, ada 80 desa dari 17 kecamatan yang akan menggelar pesta demokrasi.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus Sunaryo mengatakan jika persiapan memang di-

gelar Desember. Sedangkan tahapan pencalonan akan berlangsung mulai 14 Januari sampai 23 April 2026. "Untuk pemungutan suara pada 24 Mei 2026," ujarnya kemarin (4/11).

Menurut Probo, sebagian besar masa jabatan kepala desa akan berakhir pada Mei 2026. "Bahkan, saat ini ada 23 desa yang masih dipimpin pejabat (PJ) kepala desa, sehingga perlu segera diisi melalui pemilihan," ujarnya. Pemkab Sidoarjo, kata Probo, juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk mendukung pelaksana-

an Pilkades serentak 2026.

Bupati Sidoarjo Subandi mengingatkan soal aturan satu calon dalam pilkades. Apabila terdapat desa dengan hanya satu calon, kata Subandi, pelaksanaan pemilihan akan ditunda hingga terbitnya peraturan pekerjaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Pilkades bukan sekadar ajang memilih pemimpin desa, tetapi momentum memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat," ujarnya. (eza/hen)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pembangunan Alun-Alun Molor, DLHK Layangkan Teguran ke Kontraktor

KOTA-Proyek revitalisasi Alun-alun Sidoarjo belum mencapai target yang telah ditentukan. Pembangunan yang seharusnya rampung pada akhir November diperkirakan bakal molor dari jadwal.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Hery Santoso, menjelaskan bahwa hingga awal November, progres pekerjaan baru mencapai 60,01 persen, dari seharusnya 71,8 persen.

"Ya, realisasi capaian pekerjaan Alun-alun Sidoarjo baru 60,01 persen dari



REALISASI: Proyek Alun-alun Sidoarjo terus dikebut agar bisa selesai tepat waktu.

target 71,8 persen," ujarnya, Selasa (4/11).

Hery menyebut, keterlambatan proyek mencapai sekitar 11,8 persen dari jadwal yang telah ditetapkan. Karena itu, pihaknya akan segera memanggil kontraktor pelaksana untuk membahas penyebab keterlambatan tersebut.

DLHK Sidoarjo dijadwalkan menggelar Show Cause Meeting (SCM) atau rapat pembuktian dengan pihak kontraktor, PT Samudra Anugrah Indah Permai. Dalam rapat itu, pelaksana proyek diminta menjelaskan faktor

● Ke Halaman 10



Pembangunan Alun-Alun...

penyebab keterlambatan serta memaparkan rencana percepatan pekerjaan. "Kami sudah kirimkan surat teguran satu hingga tiga kepada kontraktor pelaksana," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, DLHK meminta pihak kontraktor menambah jumlah tenaga kerja untuk mempercepat penyelesaian proyek. Hujan yang sering turun belakangan ini disebut menjadi salah satu faktor penghambat di lapangan.

"Salah satu penyebabnya karena cuaca. Tapi kami sudah meminta agar ditambah tenaga kerja sebanyak 162 orang," ungkap Hery.

Pembangunan Alun-alun Sidoarjo menelan anggaran sebesar Rp 24,6 miliar dan ditargetkan selesai pada 15 Desember 2025. Pemerintah berharap proyek ini bisa selesai tepat waktu agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. "Harapannya bisa selesai sesuai jadwal, supaya Alun-Alun ini segera bisa dinikmati warga," pungkasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SIDAK: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat meninjau lokasi pembangunan RSUD Sedati.

Progres RSUD Sedati Baru Capai 13 Persen, Wabup Mimik Akan Ikut Awasi

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meninjau progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati, Selasa (4/11). Dari hasil pemantauan di lapangan, progres pekerjaan baru mencapai sekitar 13 persen.

M Saiful Rohman, Wartawan Radar Sidoarjo

MESKI masih jauh dari target, pihak kontraktor optimistis mampu menun-

taskan hingga 75 persen pada 18 Desember mendatang.



"Insyaallah pekerjaan bisa sampai 75 persen. Nanti kita lihat sejauh mana komitmenya," ujar Mimik usai melakukan sidak.

Mimik menegaskan, jika pekerjaan proyek tidak sesuai target, maka

akan ada konsekuensi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, kata dia, juga akan menindaklanjuti apabila terjadi keterlambatan penyelesaian proyek.

"Kalau tidak sesuai kontrak, sudah jelas nanti ada denda atau sanksi lainnya. Bisa juga diberi perpan-

jangan waktu maksimal 50 hari, tapi tetap akan kami pantau," tegasnya.

Menurutnya, kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan. Memasuki musim hujan, proses pembangunan dikhawatirkan mengalami perlambatan. "Nah, ini juga harus

• Ke Halaman 10

RADAR
SIDOARJO.ID

Progres RSUD...

dipertimbangkan karena sudah masuk musim hujan. Tapi pihak pelaksana menyatakan tetap akan mengejar target

di sisa waktu yang ada," jelas Mimik.

Ia berharap komitmen kontraktor benar-benar diwujudkan hingga akhir masa kontrak. Mimik menegaskan akan terus melakukan peng-

awasan agar progres pembangunan sesuai rencana.

"Kalau proyek ini tidak selesai sesuai jadwal, tentu ada mekanisme otomatis dalam kontrak yang akan

berjalan. Pihak BPK juga pasti akan memberikan perhatian terhadap hal

ini. Akan saya awasi terus," pungkasnya. (sai/vga)

"Salah satu penyebabnya karena cuaca. Tapi kami sudah meminta agar ditambah tenaga kerja sebanyak 162 orang," ungkap Heru.

CS Dipindai dengan CamScanner

RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Belum Bahas Usulan Revitalisasi PT Aneka Usaha Jadi BUMD Pangan



PROSPEK: Gedung PT Aneka Usaha di Jalan Untung Suropati.

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menanggapi usulan Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo terkait rencana revitalisasi PT Aneka Usaha (AU) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. Hingga kini, pembahasan resmi mengenai usulan tersebut belum dilakukan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, M. Ainur Rahman, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari usulan tersebut.

Menurutnya, rencana perubahan bentuk usaha PT Aneka Usaha masih sebatas wacana dan belum

dibahas secara formal di internal Pemkab.

"Masih belum ada usulan maupun pembahasan terkait PT AU menjadi BUMD Pangan," ujarnya, Selasa (4/11).

Ainur menilai, secara prinsip PT Aneka Usaha memungkinkan untuk bergerak di bidang pangan. Namun, ada sejumlah persyaratan administratif dan regulatif yang harus dipenuhi sebelum dilakukan perubahan bentuk usaha. "Memungkinkan, tapi ada prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu," jelasnya.

Saat ini, PT Aneka Usaha Perseroda yang

• Ke Halaman 10



Pemkab Belum Bahas...

beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 31, Sidoarjo, memiliki beberapa unit usaha, di antaranya Delta Grafiqa, Delta Gas, Delta Property, serta Delta Farm.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong agar PT Aneka Usaha direvitalisasi menjadi

BUMD Pangan. Usulan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat fraksi beberapa waktu lalu.

Langkah tersebut dinilai lebih efektif dalam membantu petani sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Fraksi Gerindra menilai, perubahan arah usaha PT Aneka Usaha akan memberi dampak langsung bagi masyarakat. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PERSIAPAN: Satpol PP Sidoarjo gelar apel besar Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (4/11).

Satpol PP Gelar Apel Besar, Siaga Antisipasi Gangguan Ketertiban dan Pelanggaran Perda

KOTA-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo menggelar apel besar untuk memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Selasa (4/11) pagi, diikuti seluruh jajaran Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian (Kasi Opsdal) Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno, A.P., menjelaskan bahwa apel besar ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi sejak dini berbagai potensi gangguan ketertiban serta menindaklanjuti sejumlah laporan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang belakangan meningkat. "Apel besar ini menjadi bentuk kesiapsiagaan kami dalam mengantisipasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat," tegasnya.

Menurut Novianto, akhir-

akhir ini banyak aduan dan laporan pelanggaran Perda yang menjadi perhatian. Karena itu, seluruh anggota Satpol PP diminta untuk bergerak cepat dan berkoordinasi dengan TNI serta Polri dalam setiap penanganan di lapangan. "Semua personel harus siap dan bersinergi lintas instansi agar penegakan Perda berjalan efektif," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh personel juga diminta memaksimalkan patroli di wilayah masing-masing, terutama di titik-titik yang rawan

pelanggaran Perda. Upaya deteksi dini melalui bidang intelijen Satpol PP turut dioptimalkan guna mencegah gangguan sebelum meluas.

"Rekan-rekan intelijen kami harus peka dan selalu berkoordinasi jika ada kejadian menonjol di tingkat desa maupun kelurahan. Setiap temuan segera dilaporkan kepada pimpinan agar dapat ditindaklanjuti dengan langkah pencegahan yang terukur," imbuhnya.

Selain fokus pada penegakan Perda, Novianto juga

menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Personel Satpol PP dan Satlinmas diinstruksikan untuk cepat tanggap membantu masyarakat yang terdampak bencana.

"Di awal musim penghujan ini, anggota Satlinmas dan Satpol PP harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat, terutama korban bencana. Kami akan melakukan pemetaan wilayah rawan dan menyiapkan langkah mitigasi bersama instansi terkait," pungkasnya. (dik/vga)



Tahun Depan Frontage Road Nyambung

► Pembebasan Lahan Beres Sediakan Rp 40 M

SIDOARJO, SURYA - Frontage road dari Waru hingga Buduran, Sidoarjo mayoritas sudah dilewati oleh kendaraan. Namun masih ada beberapa titik yang belum tersambung karena ada masalah dalam proses pembebasan lahan.

Bupati Sidoarjo Subandi, beberapa persoalan itu telah terselaskay. Pihaknya juga telah mengalokasikan dana sekitar Rp 40 miliar untuk pembangunan jalan di lahan-lahan yang sempat tersendat itu.

"Persoalannya sudah selesai, tahun depan mulai dibangun jalannya. Kita sudah siapkan dana sekitar Rp 40 miliar dalam APBD 2026. Sehingga kami berharap semua berjalan lancar dan tahun depan semua sudah bisa tembus, dari Waru sampai Buduran," kata

Bupati Subandi, Selasa (4/11).

Beberapa hal yang selama ini menjadi ganjalan antara lain pembebasan lahan makam di Waru. Menurut Subandi, persoalan itu telah terurai dalam rapat pembahasan pembangunan frontage road untuk kawasan Kedungrejo dan Waru.

Rapat tersebut melibatkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), M. Alnur Rahman, Kepala Dinas PUPR Blimbing dan SDA, Dwi Eko Saptono, Perwakilan BPN Sidoarjo, SIG, serta warga dan Pemerintah Desa Waru dan Kedungrejo.

Setelah melalui pembahasan, akhirnya tercapai kesepakatan untuk persoalan pembebasan lahan makam di Waru. Rabu (5/11, hari ini red) akan ada pembayar-

an kepada pemilik lahan sebagai ganti rugi lahan makam.

"Setelah pembayaran, proses selanjutnya adalah pengukuran peta bidang. Jika ada warga yang meninggal di sana, sudah bisa dimakamkan di lahan yang baru," kata Subandi.

Sedangkan terkait lahan makam umum Desa Kedungrejo, terungkap bahwa sudah ada musyawarah desa (Musdes) terkait lahan pengantikan makam Desa Kedungrejo. Ada tanah seluas 1.500 m² di Bungurasih Barat.

"Yang ini juga sudah tuntas. Sebelumnya sempat ada persolan sertifikat dobel. Akhirnya sudah ada kesepakatan tentang proses hukum," lanjut Subandi.

Yang disepakati, ada proses di Peradilan Tata Usaha Negara

menyangkut sertifikat yang dibeli itu. Pemkab Sidoarjo menujukkan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo, Komang Rai Warmawan untuk mengawali proses tersebut.

Bupati mengatakan proses hukum harus dijalani sampai tuntas, supaya pemerintah daerah dalam melakukan transaksi tersebut tidak terganggu masalah hukum.

Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk menentukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan Pemkab Sidoarjo. Bupati Subandi berharap pembangunan frontage road bisa segera tuntas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Jalan pendamping sepanjang sekitar 9,4 km itu bisa digunakan semua, dari Waru sampai Buduran tanpa ada kendala. (ulf)



FRONTAGE ROAD - Jalan frontage road di Sidoarjo yang direncanakan tuntas semua pembangunannya tahun depan. Beberapa persoalan yang menghalangi sudah diselesaikan oleh Pemkab Sidoarjo bersama sejumlah pihak.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sepi Pembeli, Sentra Kuliner Gajahmada Ditata Ulang

Bupati Subandi



Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H menghadiri pengajian dan malam keakraban bersama Satgas TMMD ke-126 di Balai Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Senin malam (3/11/25).

Ajak Warga Perkuat Persatuan

SIDOARJO - Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Balai Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Senin malam (3/11/25). Saat itu digelar Pengajian dan Malam Keakraban bersama Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun Anggaran 2025 Sidoarjo.

Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., menjadi momentum mempererat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, TNI, Polri, ulama, dan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, S.I.K., S.H., M.H., M.Si., Wakil Ketua PBNU KH. Zulfa Musthofa, jajaran

Wabup Tanggapi Keluhan Pedagang

SIDOARJO - Beberapa pedagang di Sentra Kuliner Gajahmada Sidoarjo mengeluh karena sepinya pembeli. Keluhan itu diterima Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, melalui media sosialnya. Pengirim pesan tersebut merupakan salah satu penjual nasi yang menempati stan bagian belakang sentra kuliner.

Menanggapi hal itu, Wabup

Mimik Idayana langsung turun ke lapangan. Sore kemarin, Senin (3/11/25), ia datang ke Sentra Kuliner Gajahmada yang merupakan aset milik Pemkab Sidoarjo. Satu per satu stan jualan yang disewakan gratis itu ditelusurnya. Beberapa pedagang pun ia ajak berbincang, mulai soal fasilitas air, listrik, hingga permodalan usaha.

Wabup Mimik Idayana berjanji akan menata ulang Sentra Kuliner Gajahmada agar kembali ramai pembeli. Menurutnya, promosi yang gencar dan kegiatan yang menarik sangat dibutuhkan untuk menghidupkan kembali tempat tersebut.

"Nanti kita tata kembali agar ramai pembeli. Harus ada event di sini supaya Sentra Kuliner Gajah-

mada semakin dikenal masyarakat luas," ujarnya.

Ia menambahkan, promosi melalui media sosial menjadi cara efektif untuk memperkenalkan suatu tempat. Namun, diperlukan pula hal menarik yang bisa ditonjolkan, seperti menu andalan dari pedagang yang bisa menjadi daya tarik pengunjung.

"Kuliner yang masih yang paling menonjol harus kita tampilkan, karena sekarang jamananya media sosial. Kalau kita hanya menunggu pembeli datang, tidak akan bisa. Kita harus aktif di medsos," tegaskannya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Sidoarjo, Amat Adi Subhan, menjelaskan bahwa terdapat 80 stan di Sentra Kuliner Gajahmada. Namun saat ini hanya 42 stan yang masih aktif berjualan. Padahal, pada awal pembukaan tahun 2019, seluruh stan tersi penuh.

"Tahun 2019 seluruh PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Gajahmada kita pindah ke sini. Semua difasilitasi gratis, mulai listrik dan air tanpa pungutan apa pun."

Jelasnya.

Amat menyayangkan kondisi

sentra kuliner saat ini yang mulai

sepinya pengunjung. Padahal sebelum

pandemi Covid-19, tempat itu sem-

pat ramai. Ia menegaskan bahwa

Pemkab Sidoarjo akan terus beru-

aya meramaikan kembali sentra

kuliner tersebut melalui berbagai

kegiatan.

"Rencana ke depan, setelah ada

appraisal, tempat yang kosong akan

kita lengang untuk pelaku UMKM



Wabup Sidoarjo Mimik Idayana kunjungi sentra kuliner Gajahmada Senin sore (3/11/25).

di Sidoarjo agar semakin ramai." Beliau tadi meminta agar diadakan tambahnya.

Sementara itu, Ari, pemilik Warung Inyo yang menempati salah satu stan, berharap Pemkab Sidoarjo bisa kembali memajukan Sentra Kuliner Gajahmada. Menurutnya, banyak stan kosong di bagian be-

lakang karena ditinggalkan pem-

iliknya akibat sepinya pembeli.

"Alhamdulillah Bu Mimik datang

ke sini dan mengajak kami untuk

memajukan sentra kuliner ini. • Loe

DUTA
MEDIA



LOETRDUTA

Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H. menghadiri pengajian dan malam keakraban bersama Satgas TMMD ke-126 di Balai Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Senin malam (3/11/25).

Ajak Warga Perkuat Persatuan

SIDOARJO – Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Balai Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Senin malam (3/11/25). Saat itu digelar Pengajian dan Malam Keakraban bersama Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun Anggaran 2025 Sidoarjo.

Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, TNI, Polri, ulama, dan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, S.I.K., S.H., M.H., M.Si., Wakil Ketua PBNU KH. Zulfa Musthofa, jajaran Forkopimka Tulangan, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Pengajian dan malam keakraban itu diisi tausiyah kebangsaan yang menggugah semangat persatuan dan kesatuan. Kegiatan yang diikuti ratusan prajurit TNI bersama warga tersebut juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antarinstansi dan masyarakat.

Bupati Subandi menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang menggabungkan nilai religius dan semangat gotong royong.

“TMMD bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi juga membangun jiwa kebersamaan dan nasionalisme di tengah warga. Melalui pengajian ini, kita kuatkan kembali ikatan antarwarga agar Sidoarjo tetap rukun, damai, dan sejahtera,” ujar Bupati Subandi.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman Indonesia. Menurutnya, peran besar TNI dan Nahdlatul Ulama (NU) sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan toleransi.

“Indonesia ini kuat karena Pancasila dan semangat gotong royong. TNI dan ulama berperan penting menjaga agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan,” tuturnya.

Bupati Subandi juga menyoroti pentingnya peran generasi muda untuk aktif dalam kegiatan positif agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang memecah belah di media sosial.

“Kalau anak muda rajin ikut kegiatan seperti pengajian dan gotong royong, mereka tidak mudah diadu domba. Ini wujud nyata bela negara,” ucapnya. • Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

LINTAS PELAYANAN

Bupati Instruksikan Pegawai agar Kerja Lembur Mengeruk Sungai

Sidoarjo, Bhirawa

Bupati Sidoarjo, Subandi, menginstruksikan kepada pegawai yang ada di Dinas PUBM Sidoarjo agar lembur kerja pada Hari Sabtu dan Minggu agar maksimal pengeringan sungai. Karena dirinya berharap saat menghadapi musim hujan di akhir tahun 2025 ini, semoga Pemkab Sidoarjo dalam menormalisasi sungai sudah berjalan minimal 80 persen sebelum puncak musim hujan.

Menurutnya, pengerajan normalisasi sungai di wilayah Sidoarjo akan terus dikebut. Alat-alat berat sudah dikerahkan. Untuk mengangkat endapan lumpur maupun tumbuhan liar ke permukaan sungai. Dirinya memantau pengeringan 3 sungai di Kecamatan Candi. Mulai dari Sungai Mbah Gepuk Balongdowo, sungai Kedungpeluk dan sungai Tekuk Penjalin, Pecabean.

Setiap Minggu dirinya minta ada laporan progres normalisasi sungai tersebut. Dirinya juga minta Dinas PU Bina Marga Sidoarjo agar menyewa alat berat jika benar-benar dibutuhkan. Disampaikan Subandi penanganan banjir akan difokuskan di wilayah rawan genangan. Diantaranya wilayah Kecamatan Tanggulangan, Candi, Porong dan Taman.

Subandi juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut kegiatan normalisasi lingkungan. Saluran-saluran kecil yang tersumbat agar dibersihkan. "Saya akan membuat surat edaran kepada camat dan kepala desa untuk ikut melaksanakan normalisasi lingkungan diwilayahnya masing-masing," pungkasnya. [kus.ca]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Sidoario Sidak Kualitas Pelayanan dan Progress Pembangunan RSUD Sidoarjo Barat



seputarindonesiatv.id || Sidoario - Wakil Bupati Sidoario, H. Mimik Idayana, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoario Barat (Sibar) pada Selasa (4/11). Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan dan memantau langsung progress pembangunan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Gedung utama RSUD Sibar kini telah beroperasi penuh, namun sejumlah pembangunan fasilitas pendukung masih terus dikerjakan pada tahun 2025.

Beberapa proyek yang sedang berjalan diantaranya pembangunan Ruang Operasi dengan nilai anggaran sekitar Rp7,3 miliar, pembangunan Gedung Hemodialisa (lavanian cuci darah), dan perbaikan fasilitas IGD lantai 3 yang sebelumnya ditemukan mengalami kerusakan pada bagian lantai dan atap.

Dalam sidaknya, Wabup Mimik Idayana meninjau sejumlah area penting seperti ruang pelayanan pasien, IGD, dan proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan baik dari sisi kecepatan, ketepatan, maupun kenyamanan pasien.

"Optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Pemkab Sidoario akan terus melengkapi fasilitas yang dibutuhkan, terutama ruang operasi dan Gedung Hemodialisa agar segera bisa digunakan," ungkap Mimik Idayana.



Ia juga mengingatkan tenaga medis untuk menjaga profesionalisme dalam melayani masyarakat. "Kami ingin seluruh dokter dan perawat memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai muncul keluhan masyarakat karena penanganan yang lambat," tegasnya.



Menanggapi keterlambatan sekitar 16 persen pada progres pembangunan Gedung Hemodialisa, Mimik Idayana memastikan bahwa pihak pelaksana siap bertanggung jawab penuh. "Baru saja saya dapat penjelasan langsung dari pelaksananya. Mereka berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Sidoarjo Barat, dr. Abdullah Segaf Al Hadad, mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Wakil Bupati. Menurutnya, kehadiran Wabup Mimik Idayana memberikan dorongan semangat bagi seluruh tim rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu layanan dan fasilitas.

"Sidak ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Harapan kami, RSUD Sibar dapat menjadi rumah sakit rujukan utama di wilayah barat Kabupaten Sidoarjo," ujarnya.

Salah satu pasien asal Balongbendo juga menyampaikan kepuasan terhadap pelayanan rumah sakit. "Sekarang pelayanannya lebih baik serta petugasnya ramah dan murah senyum.

Semoga fasilitas baru segera bisa digunakan supaya warga tidak perlu jauh-jauh berobat," tuturnya.

Wabup Mimik Idayana berharap, seluruh masyarakat Sidoarjo bisa mendapatkan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan mudah dijangkau.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Beri ‘Isvarat’ Bongkar Tembok Pembatas, Warga Mutiara Regency Punya Waktu Sepekan Lakukan Sanggahan



Bupati Sidoarjo H. Subandi memberikan waktu sepekan ini kepada warga Perum Mutiara Regency, untuk memberikan paparan argumentasi dari segi hukum, terkait penolakan pembukaan akses jalan integrasi perumahan Mutiara City dan perumahan Mutiara Regency.

Ini disampaikan Bupati, dalam rapat kordinasi pembukaan akses jalan tembus di ops room Setda Sidoarjo Selasa (4/11/2025).

“Hari ini saya masih menghormati teman-teman dari Perumahan Mutiara Regency, untuk menghadirkan tim ahli hukumnya memaparkan segi hukumnya. Dan kalau kita melihat dari undang-undang yang telah dipaparkan, serta masukan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait, integrasi jalan tersebut harus dibuka,” tegas Bupati Subandi.

Meski demikian, lanjut Bupati Subandi, pihaknya tetap memberikan kesempatan warga Perumahan Mutiara Regency untuk memberikan pandangan hukum sebagai kajian sebelum ada keputusan final.

“Setelah satu minggu, keputusan tersebut akan saya ambil. Ini saya lakukan karena tidak ingin menyakiti warga saya sendiri,” terangnya.

Dalam rapat kordinasi dipimpin Bupati Subandi itu, disimpulkan pembukaan akses jalan sebagai bentuk integrasi kawasan dua perumahan itu, bisa segera dilakukan.

Rapat berlangsung hampir dua jam ini dihadiri pejabat Forkompinda Sidoarjo, dan pejabat OPD terkait, serta Dinas Perhubungan Jatim.

Hadir pula perwakilan warga Perumahan MC dan Perumahan MR, yang berselisih terkait rencana pembukaan akses jalan yang mengintegrasikan dua kawasan perumahan tersebut.

Rapat ini juga sebagai tindaklanjut surat Dirjen Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI No. 0105-Pp/230 tertanggal 24 September 2025. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo, yang isinya perihal: Penegasan Instruksi Integrasi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di kawasan Perumahan di Sidoarjo.



Bupati Subandi menegaskan yang dipolemikan antara warga Perumahan MC dan MR terkait rencana pembukaan akses jalan itu merupakan PSU—yang statusnya menjadi milik Pemkab Sidoarjo.

Sehingga pihaknya mempunyai hak dan kewenangan memanfaatkan PSU, termasuk digunakan sebagai jalan tembus sebagai akses integrasi kawasan perumahan.

“Seandainya hari ini diputuskan, bisa saha saya lakukan. Tinggal bupati tandatangan, juga Kapolres dan Dandim tandatangan selesai. Tetapi saya masih memberikan kesempatan kepada warga saya untuk menghadirkan ahli hukumnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan hasil rapat di Pemprov Jawa Timur yang dipimpin Gubernur Jatim—dihadiri pula Kajati, Kapolda telah disimpulkan bahwa konektivitas dan kemasyarakatan adalah yang utama yang harus dijalankan sesuai regulasi dan undang-undang yang ada.

“Jadi kesimpulan ini tidak kebijakan. Tolong harus dicatat tidak kebijakan, tetapi undang-udang,” tegas Bupati Subandi.

Terkait masalah ini, pihaknya meminta kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jatim segera membuat kajian Amdal Lalin, dan tidak perlu menunggu ada persetujuan, karena undang-undangnya sudah jelas.

“Saya ingin ada kajian di lokasi tersebut, kalau untuk memulai jalan dan kepentingan umum akan kita lakukan. Sambil kita menunggu satu minggu lagi kita rapat kembali mendengarkan pandangan ahli dari Mutiara Regency. Jika ada pandangan yang lain, tentu akan kita kaji. Setelah ada kajian tersebut terus kita putuskan.” terangnya. (Abidin)

